

MEDIA PARTISAN INDONESIA VERSUS REGULATOR MEDIA PADA PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK MEDIA

Robbikal Muntaha Meliala, S.Sos, M.I.Kom¹, Luluk Uliyah, M.I.Kom²

AKOM BSI Jakarta¹

Jl. Kayu Jati 5 No.2, Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Tlp (021) 29385139 Fax (021) 29385144

E-mail : bikal.muntaha@gmail.com, robbikal.rtl@bsi.ac.id

Universitas Mercu Buana²

Jl. Raya Meruya Selatan No. 1 Kembangan, Jakarta Barat 11650, Tlp (021) 5840815 Fax (021) 5870341

Email : lulukuliyah@gmail.com

ABSTRAK

Struktur pasar media massa Indonesia saat ini cenderung bergerak ke oligopoli. Penelitian sebelumnya menunjukkan pemusatan kekuatan pada 13 konglomerasi media nasional dimana beberapa dari mereka aktif di partai politik. Hal ini berpengaruh pada praktik pers bekerja saat ini dalam membentuk opini publik cenderung menguntungkan pengiklan dan kepentingan konglomerasi. Teori Ekonomi Politik Media (Moscow, 1996) digunakan dalam penelitian ini terdiri atas komodifikasi, spasialisasi dan strukturasi. Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif Deskriptif pendekatan Fenomenologi. Dari pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan: Dialektika terjadi antara pihak media partisan dengan regulator media massa pada beberapa hal dimana Media Partisan menganggap masyarakat Indonesia adalah khalayak yang sudah pintar dan aktif dalam mengkonsumsi media sementara regulator beranggapan khalayak masih pasif dan mereka tidak punya pilihan dalam mengkonsumsi media. Independensi dan Netralitas adalah konsep yang berbeda dalam praktik pers, sehingga pers sebagai manusia biasa tidak ada yang dapat netral keseluruhan. Regulasi batasan kepemilikan media belum diatur dalam undang-undang kecuali hanya media televisi.

Kata kunci : Media Partisan, Ekonomi Politik Media

ABSTRACT

Market structure of Indonesia's Mass Media currently move to oligopoly. Previous research has shown the power centralization to 13 conglomerates of national mass media where some of them active in political party. This condition impacted to press practice in working today, to create public opinion tend prioritized advertisers and conglomerate needs. Theory of Economy Political Media (Moscow,1996) was applied into this research which consist of Commodification, Spatialization and Structuration. Research Methodology: Descriptive Qualitative Research with Phenomenology Approached. From discussion of research result, can be summarized : Dialectical has been happened between partisan mass media and regulator in to several context which partisan media perceives Indonesian people are smart audience and active to access and choose available media meanwhile regulator side perceives contrary that Indonesian people still passive and they have no choice in consuming media. Independency and Neutrality are different concept in Press Practically, so that press as common human never have capability to be neutral totally. Regulation of media share owned had been not yet well arranged except television media.

Keywords: *Partisan Media, Economic Political Media*

PENDAHULUAN

Struktur pasar media massa Indonesia saat ini bergerak ke arah oligopoli. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lim, dkk (2011) menunjukkan terjadinya kecenderungan pemusatan kanal media massa nasional pada 13 konglomerat. Di antara konglomerat tersebut ditemukan fakta bahwa mereka terlibat dalam partai politik secara aktif. Gejala ini menimbulkan media partisan Indonesia berdiri meramaikan demokrasi.

Picard dalam Meliala (2018a) menyatakan tidak ada industri media beroperasi di situasi pasar persaingan sempurna karena kebanyakan media membedakan diri mereka masing-masing dan mencoba memisahkan target penonton (*audiences*) mereka. Industri Majalah menunjukkan yang paling bersaing namun secara jelas masih beroperasi di struktur pasar persaingan monopolistik. Kecenderungan struktur pasar media massa berdasarkan jenisnya terdiri atas televisi kabel berada di struktur pasar monopoli, surat kabar cenderung berada diantara pasar oligopoli dan monopoli. Sedangkan program televisi bisa berada di oligopoli dan monopolistik.

Di dalam teori ini, industri media merupakan industri yang unik dan tidak seperti biasanya, karena mereka beroperasi di wilayah *dual product market*. Dalam konsep dan peranan perusahaan di pasar, biasanya terbagi hanya atas perusahaan produk atau perusahaan jasa. Namun pada industri media massa mengoperasikan keduanya. Setiap media massa mempunyai dua bidang yang harus dikendalikan yaitu Isi Bidang Redaksi (berkaitan dengan muatan isi berita dan informasi yang disampaikan) dan Isi Bidang Perusahaan (berkaitan dengan akses kepada pengiklan dan penyediaan tempat untuk penonton dalam mempromosikan usahanya kepada masyarakat luas).

Teori ini terkonfirmasi dengan keadaan persaingan media massa Indonesia sekarang dimana berpengaruh pada praktek kerja pers dalam membentuk opini publik cenderung menguntungkan kepentingan pengiklan dan konglomerasi saja. Gejala ini sangat nyata ditemukan saat kontestasi pemilihan presiden 2014 lalu antara Joko Widodo dan Prabowo. Media massa begitu kental terlihat mbingkai beritanya sesuai dengan ideologi dan afiliasi politik yang dipegang oleh pemiliknya. Sebagai contoh antara Metro TV bersikap frontal membela Joko Widodo versus TV One yang bersikap frontal membela kubu Prabowo.

Gejala ini jika dibiarkan berlarut akan melunturkan idealisme pers yang seharusnya menjaga independensi dan objektivitas dalam penyampaian berita. Korban dalam polemik ini tentunya adalah masyarakat awam yang akan menjadi bingung dalam menerima informasi dan memilih media massa mana yang dapat dipercaya.

Penelitian yang dilakukan Meliala (2018a) juga menunjukkan sikap Metro TV dalam persaingan pasar oligopoli terkonfirmasi positif sebagai stasiun televisi berita di Indonesia yang konsisten dalam mengkritik pemerintah dengan cara tidak ekstrem karena pengaruh ideologi dan afiliasi politik dari pemilik media sebagai koalisi pendukung pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla periode 2014-2019. Oleh karena itu, saat ini mereka berstrategi untuk fokus pada peningkatan publikasi pemberitaan ekonomi, program entrepreneur dengan konsep 75% s.d 85% *in-house production* dalam sajian *talkshow* atau berita *hard news*.

Berawal dari ini, penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian sebelumnya untuk mengetahui bagaimana perspektif pelaku media partisan dan regulator media Indonesia dalam mempertimbangkan berkurangnya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat serta objektif atas nama kebebasan pers di era oligopoli. Tentunya dialektika terjadi pada kedua kubu tersebut. Konsep penting yang menjadi kesepakatan dan ketidaksepakatan di antara kedua kubu ini-lah yang berusaha dijawab penulis melalui penelitian dengan pendekatan fenomenologi dan pengayaan teori ekonomi politik media.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi non partisipan, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

Menurut Meliala (2018b), Perbedaan peneliti kualitatif dan kuantitatif pada interaktivitas dengan objek penelitiannya. Peneliti kualitatif berkeinginan realitas dapat diamati secara menyeluruh baik unsur dalam maupun luar oleh semua orang, kasusnya dapat berupa sosial kebudayaan, situasional dan kontekstual. Mereka menginginkan dapat menjelaskan kasus itu sebaik mungkin.

Sementara, peneliti kuantitatif mengutamakan tentang perbedaan antara efek utama seperti kinerja antara laki-laki dan perempuan, dengan membandingkan sub-populasinya. Demografi dan gender adalah efek utama yang akan diukurnya atau diamatinya.

Oleh karena itu, Penelitian pendekatan kualitatif biasanya tidak mendasarkan hasil penelitian dengan logika matematik dan bukti empirik namun lebih mendasarkan diri pada hal-hal yang bersifat diskursif dan data yang bersifat non diskursif.

Menurut littlejohn dalam Pawito (2007), sebagai suatu gerakan dalam berpikir, fenomenologi (*phenomenology*) dapat diartikan sebagai upaya studi tentang pengetahuan yang timbul karena rasa kesadaran ingin mengetahui. Objek pengetahuan berupa gejala atau kejadian-kejadian dipahami melalui pengalaman secara sadar (*councilus*

experience). Fenomenologi menganggap pengalaman yang aktual sebagai data tentang realitas yang dipelajari.

Peneliti sebagai instrumen penelitian, tidak berasumsi apapun terhadap orang yang ditelitinya, melainkan mencoba merangkai pengalaman informan yang diteliti menjadi realitas yang ditemukan sesuai sudut pandang mereka (Bajari dalam Susanti dan Koswara, 2018).

Teori fenomenologi Husserl kemudian dikembangkan oleh Alfred Schutz yang menerapkannya pada penelitian ilmu sosial. Fenomenologi Schutz meneliti bagaimana anggota masyarakat menggambarkan dunia sehari-hari sebagaimana interaksinya dengan individu lain (Schutz dalam Creswell, 1998).

Penulis melakukan observasi non partisipan dalam menyelesaikan penelitian ini. Menurut Kriyantono (2012), Observasi (pengamatan) merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada riset kualitatif. Dalam riset dikenal dua jenis metode observasi yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan.

Observasi non partisipan merupakan metode dimana periset hanya bertindak mengobservasi tanpa ikut terjun melakukan aktivitas yang dilakukan kelompok yang diriset, baik kehadirannya diketahui atau tidak (Kriyantono, 2012).

Selain itu, penulis mendapatkan data primer dengan wawancara mendalam kepada informan yang terdiri dari lima orang. Penulis membaginya dalam dua kubu yaitu kubu dari media partisan dan kubu dari regulator atau pengkritisi media. Dari kubu media, penulis mengambil sampel secara purposif.

Menurut Pawito dalam Meliala (2017), 'Teknik pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif berbeda dengan kuantitatif, lebih mendasarkan diri pada alasan atau pertimbangan-pertimbangan tertentu (*purposeful selection*) sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu sifat metode sampling dari penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah *purposive sampling*.'

Penulis memilih pihak dari Media Grup yang dikenal sebagai salah satu media partisan di Indonesia. Mereka adalah Elman Saragih dan Eko Suprihatno. Sementara dari kubu regulator atau pemerhati serta pengkritisi media terdiri dari Firdaus Cahyadi, Andreas Harsono dan Nezar Patria.

Menurut Berger dalam Kriyantono (2012), wawancara adalah percakapan antara periset (seseorang yang berharap mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang objek)". Jenis wawancara yang ditemukan dalam kegiatan riset terdiri atas ; wawancara pendahuluan, wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara semistruktur (*semistructured interview*) dan wawancara mendalam (*depth interview*). (Kriyantono, 2012).

Jenis wawancara yang dilakukan penulis untuk penelitian ini adalah wawancara mendalam dan wawancara semistruktur. Menurut Kriyantono (2012), wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung tatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Sementara, wawancara semistruktur adalah saat pewawancara biasanya mempunyai daftar pertanyaan tertulis tapi memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan secara bebas yang terkait dengan permasalahan. Wawancara ini dikenal pula dengan wawancara terarah atau wawancara bebas terpimpin. Wawancara ini dilakukan secara bebas tetapi terarah dengan berada pada jalur pokok permasalahan yang akan ditanyakan dan telah disiapkan terlebih dahulu. (Kriyantono, 2012)

Elman Saragih adalah tokoh senior media massa yang saat ini masih menjabat sebagai Dewan Redaksi Media Group (PT. Media Televisi Indonesia (Metro TV) dan Surat Kabar Media Indonesia). Dahulu pernah menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Media Group hingga pada Juni 2013, namun struktur tersebut harus diganti karena keterlibatannya sebagai pengurus partai Nasional Demokrat (Nasdem) atas mandat dari Bapak Surya Paloh sebagai Pemilik dari Media Group. Pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, 15 Maret 1953 ini merupakan lulusan Sarjana dari Universitas Kristen Satya Wacana, Jawa Tengah tahun 1975. Beliau memulai karir sebagai wartawan sejak tahun 1976. Di kancah politik, beliau adalah mantan Calon Legislatif untuk Dapil Sumatera Utara dari partai Nasdem dengan nomer urut 2 pada pemilu 2014 lalu, namun tidak berhasil terpilih.

Eko Suprihatno adalah salah satu Akademisi dan Praktisi di Media Massa Indonesia. Profesi beliau sebagai Redaktur Opini Harian Media Indonesia dan Dosen IISIP (Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Jakarta, membuatnya kaya informasi dan pengalaman tentang jurnalistik dan Media Massa. Pria kelahiran 1 September 1968 ini merupakan lulusan Sarjana Jurnalistik dari IISIP Jakarta pada tahun 1993. Awal karirnya di dunia jurnalistik dimulai dari saat Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di IISIP dahulu pada 1992 di Majalah Sarinah, hingga beliau bertahan di majalah tersebut sebagai Kontributor sampai lulus Kuliah Sarjana-nya tahun 1993. Setelah lulus dari IISIP Jakarta, pada tahun 1993 hingga 1994, beliau bekerja sebagai wartawan "Internal Magazine" (Menpora). Lalu berlanjut pengalamannya pada tahun 1994 s.d 1999, beliau bekerja sebagai wartawan "Harian Terbit" (Koran terbit Sore hari) . Semenjak tahun 1999 s.d sekarang, beliau aktif bekerja sebagai wartawan di Harian Media Indonesia dengan jabatan saat ini adalah Redaktur Opini.

Firdaus Cahyadi saat ini menjabat Direktur Eksekutif Yayasan Satu Dunia. Yayasan Satu Dunia

adalah lembaga yang memiliki konsentrasi dalam hak-hak warga untuk bermedia. Firdaus Cahyadi banyak menulis opini di surat kabar terkait isu sosial dan media. Beberapa penelitiannya berkaitan dengan media, yaitu Kebijakan Telematika dan Pertarungan Wacana di Era Konvergensi Media (*Satu Dunia-TIFA Foundation, 2011*) dan Digital Media Mapping (*Open Society Institute-OSI Europe, 2011*).

Andreas Harsono, saat ini aktif di *Human Rights Watch*. Beliau pernah bekerja untuk harian *The Nation* (Bangkok), *The Star* (Kuala Lumpur), *Associated Press Television* (Hong Kong). Beliau pernah bergabung di *The Jakarta Post* sebelum diberhentikan karena ikut andil dalam gerakan bawah tanah untuk melengserkan Soeharto. Beliau juga salah seorang pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Pantau, sebuah yayasan yang dulunya merupakan perusahaan penerbitan majalah yang berfokus pada kritik media dan penulisan liputan-liputan dengan genre jurnalisme sastrawi. Andreas juga andil dalam mendirikan Institut Studi Arus Informasi. Beliau banyak menulis untuk surat kabar terkemuka seperti *Huffington Post*, *NY Times*, dan masih banyak lagi. Beliau memperoleh beberapa penghargaan internasional antara lain *The Correspondent of the Year* dari *The American Reporter (1997)* serta *Nieman Fellowship* dari *Universitas Harvard (1999-2000)*. Dia *co-editor* buku *Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat (2005)*. Kini dia sedang menyelesaikan buku *From Sabang to Merauke: Debunking the Myth of Indonesian Nationalism*.

Nezar Patria adalah anggota Dewan Pers periode 2013 – 2016 dari unsur wartawan. Saat ini Nezar menjabat sebagai salah satu pemimpin redaksi harian *Jakarta Post*. Sebelumnya Beliau menjabat Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia. Perjalanan Nezar sebelum menjadi wartawan cukup berliku. Pada 13 Maret 1998, lelaki kelahiran Sigli, 5 Oktober 1970 ini bersama sejumlah aktivis pro demokrasi diculik oleh Kopassus di sebuah rumah susun di Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Saat itu Nezar adalah Sekretaris Jenderal Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (SMID). Organisasi yang berafiliasi ke Partai Rakyat Demokratik (PRD). Setelah Soeharto dan rezim Orde Baru tumbang, Nezar Patria banting setir. Dia memilih menjadi wartawan. Diawali dengan bergabung di majalah DR pada 1999 hingga 2000, kemudian Nezar pindah ke *Tempo* hingga tahun 2008. Saat di *Tempo*, liputannya tentang kerusuhan Mei 1998 memenangkan *Journalism for Tolerance Prize* yang digelar *International Federation of Journalist (IFJ)* di Manila, Filipina. Pada 2008, Nezar ikut mendirikan portal berita *VIVA.co.id*, yang kemudian terpaksa ditinggalkan menjelang pemilu 2014 lalu lantaran beda prinsip dengan manajemen media milik Aburizal Bakrie itu. Beliau alumnus Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1997), dengan fokus studi filsafat

politik, dan meraih gelar MSc untuk politik dan sejarah internasional di *London School of Economics (LSE)*, Universitas London, Inggris (2007). Nezar terpilih sebagai Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia periode 2008-2011. Beliau juga menjadi anggota tim misi pembebasan wartawan RCTI Feri Santoro di Aceh yang disandera Gerakan Aceh Merdeka (2004). Nezar tercatat sebagai editor jurnal pemikiran sosial dan ekonomi *Prisma (LP3ES)*, serta menulis sejumlah buku antara lain “Negara dan Hegemoni Menurut Antonio Gramsci” (1999, bersama Andi Arief). Artikelnya bersama Agus Sudibyo, “*The Television Industry in Post Authoritarian Indonesia*” dimuat di *Journal of Contemporary Asia, Oxford, Inggris (2013)*.

Setelah mendapatkan data primer, penulis memperkuat penelitian dengan data sekunder yang diperoleh dengan teknik riset perpustakaan dan dokumentasi. Menurut Ruslan (2008), Riset perpustakaan adalah dilakukan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan. Sementara, dokumentasi menurut Kriyantono (2012) adalah instrument pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data, tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. Moleong dalam Herdiansyah (2010) mengemukakan dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan bahan dalam studi dokumentasi antara lain dokumen pribadi dan dokumen resmi.

LANDASAN TEORI

Media Partisan

Menurut McQuails dalam Yoedjadi dan Pribadi (2017) menyebutkan *partisanship* pada media akan mengurangi kualitas informasi yang dihasilkan dan media yang diketahui publik sebagai media partisan akan kehilangan kepercayaan publik. Hal ini sejalan dengan pemikiran Hirst dan Patching (2005), media massa adalah salah satu lembaga sosial, karena itu memiliki tanggung jawab kepercayaan publik (*public trust*). Sementara Kovach dan Rosentiel (2006) merumuskan Sembilan elemen jurnalisme untuk mengingatkan kembali peran dan fungsi jurnalistik di tengah masyarakat. Pada elemen kedua, Kovach dan Rosentiel merumuskan posisi jurnalisme di hadapan warga, bahwa loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga. Artinya, jurnalisme tidak boleh mementingkan kelompok, golongan, etnik bahkan pelanggan pembaca atau penontonnya.

Berimbang dan netral sejatinya merupakan bentuk objektivitas media massa. Sikap ini harus ditunjukkan oleh media massa dalam memproduksi berita. Kode etik jurnalistik yang diterbitkan oleh Dewan Pers, pada pasal tiga telah menggariskan mengenai sikap untuk menjaga keberimbangan dan

independensi. Sementara untuk televisi aturan tersebut masih ditambah dengan Pedoman Perilaku Penyiaran, Pasal 11 dan 22, serta Standar Program Siaran yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 11, pasal 40, dan pasal 71, agar redaksi televisi menjaga independensi dan netralitas. Berkaca pada kontestasi pemilihan presiden 2014, KPI pernah mengeluarkan teguran dan pertimbangan untuk tidak mengeluarkan ijin baru kepada dua stasiun televisi yang dinilai tidak mampu menjaga netralitas. (Merdeka dalam Yoedjadi dan Pribadi, 2017).

Teori Ekonomi Politik Media

Menurut Smith (2015), ekonomi politik merupakan ilmu yang memiliki dua tujuan yakni, menciptakan sumber pendapatan kemudian yang kedua adalah memberikan daya pada pemerintah agar mampu menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dengan baik.

Pada dasarnya ekonomi politik ini merupakan sebuah hubungan timbal balik yang terjadi antara kepentingan ekonomi dan juga kepentingan politik. Dimana akan terjadi hubungan yang saling mendukung di dalam keduanya. Sangat lumrah juga jika kita temukan seseorang yang memiliki kemampuan secara ekonomi akan sangat tertarik memasuki dunia politik.

Ada tiga varian penting dalam pendekatan ekonomi politik, yang pertama adalah ekonomi politik klasik. Ekonomi politik klasik merupakan ekonomi politik berbasis pasar atau berdasarkan kapitalisme. Yang kedua adalah ekonomi politik *keynesian* dimana negara diperkenankan memberikan intervensi jika perekonomian mengalami krisis. Ketiga adalah ekonomi politik Marxian, yaitu perekonomian yang di dorong sepenuhnya oleh Negara (Alwyny,2015).

Menurut Moscow (1996), Ekonomi politik media muncul karena besarnya efek yang diberikan oleh media massa pada khalayak. Karena kekuatan penyebarannya yang sangat efektif, maka media massa tidak hanya dianggap memberi pengaruh pada kehidupan sosial, politik dan budaya, namun juga kehidupan ekonomi. Diharapkan dengan adanya pemberitaan atau informasi yang dimunculkan di media massa mampu mendongkrak atau meningkatkan penjualan produk atau jasa.

Lebih lanjut Vincent Mosco memiliki tiga konsep mengenai ekonomi politik media, yaitu:

1. Komodifikasi

Bagaimana proses transformasi jasa maupun barang menjadi komoditas yang mempunyai nilai tukar pasar. Komodifikasi ini dibagi kembali oleh Vincent Mosco:

a. Komodifikasi isi

Komodifikasi isi, yakni proses mengubah pesan dan sekumpulan data

ke dalam sistem makna menjadi produk-produk yang dapat dipasarkan

b. Komodifikasi khalayak

Komoditi khalayak diartikan sebagai media massa menghasilkan proses di mana perusahaan media memproduksi khalayak dan menyerahkannya pada pengiklan.

c. Komoditi *cybernetic* yang terdiri dari *intrinsic commodification* dan *extensive commodification*.

Komodifikasi *intrinsic*, adalah khalayak sebagai media yang berpusat pada pelayanan jasa rating khalayak. Jadi yang dipertukarkan bukan pesan atau khalayak melainkan rating. Sementara komodifikasi *extensive*, proses komodifikasi menjangkau seluruh kelembagaan pendidikan informasi pemerintah.

2. Spasialisasi

Spasialisasi horisontal: ketika sebuah perusahaan yang ada dalam jalur media yang sama membeli sebagian besar saham pada media lain, yang tidak ada hubungannya langsung dengan bisnis aslinya atau ketika perusahaan mengambil alih sebagian besar saham dalam suatu perusahaan yang sama sekali tidak bergerak dalam bidang media. Misal : Media Group dengan Hotel Papandayan.

Spasialisasi vertikal: konsentrasi perusahaan dalam suatu jalur usaha yang memperluas kendali sebuah perusahaan atas produksi. Misal : MNC yang mempunyai stasiun-stasiun tv, radio juga media cetak

3. Strukturasi

Menggambarkan proses melalui mana struktur dibangun dari agensi manusia, meskipun mereka menyediakan “medium” dari konstitusi itu. Kehidupan sosial itu sendiri terdiri atas konstitusi struktur dan agensi. Karakteristik penting dari teori strukturasi ini adalah kekuatan yang diberikan pada perubahan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Kubu Media Massa Partisan

Menurut Elman Saragih, Persaingan Media Massa saat ini seperti “*Perang Baratayudha*” terutama untuk media cetak, jika media massa tidak akurat dalam menyampaikan pesannya kepada khalayak, terlalu berpihak, tidak menjaga mutu nilai berita, maka akan mati dan berdarah-darah.

Industri media massa mustahil berdiri tanpa adanya Iklan. Dengan iklan ini, media massa bisa membiayai produksi siaran atau penerbitannya dan membiayai upah para karyawannya, jadi banyak nasib orang ada di balik media massa jika dilihat

dari komoditi bisnis. Disinilah pelaku bisnis media massa menemukan tantangan antara untuk mempertahankan idealismenya sebagai “Pers” atau “bernegosiasi dengan kepentingan konglomerasi atau pengiklan”.

Kehadiran 13 *Group* konglomerasi itulah yang menjadi bukti persaingan media massa semakin ketat dan menjadi permasalahan ketika sebagian pemilik media massa tersebut masih tergoda dengan kekuasaan dan politik sehingga fungsi dan peran pers menjadi terkalahkan. Ideologi pers secara teoritis haruslah jujur, informatif dan media penyampai hiburan, secara praktis kini menjadi bias. Faktor yang menyebabkannya adalah ketika sebagian oknum rela menggadaikan 100 persen idealismenya demi sebuah kekuasaan konglomerasi dan pengiklan.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi yang pesat, membuat media massa khususnya cetak harus memutar otak menemukan strategi untuk dapat menarik perhatian pangsa pasarnya. Surat kabar atau Koran ada kecenderungan lama-kelamaan akan ditinggalkan masyarakat karena dianggap kurang “Cepat” dan “Susah diakses” dalam menyampaikan beritanya. Jika kita bandingkan, kini mana orang yang lebih tertarik untuk membaca Koran atau menonton berita di televisi? Maka jawabannya, cenderung kebanyakan orang memilih menonton berita di televisi. Alasannya adalah :

1. Televisi mudah diakses dan tidak perlu membayar
2. Sifat siarannya yang audio visual memudahkan penonton atau pemirsanya untuk memahami isi berita dibanding Koran.
3. Koran sendiri susah untuk diakses dan harus “membeli” terlebih dahulu, baru kita bisa menikmati berita itu, berbeda dengan televisi.
4. Ditambah lagi dengan kehadiran media *online* yang bisa diakses kapan saja di *mobile phone* semua orang sungguh membantu orang-orang yang sibuk tetap dapat mengakses berita.

Elman saragih tidak menyalahkan pemerintah sebagai regulator dalam kasus ini. Sesungguhnya regulasinya sudah benar, namun ini kembali pada “Oknum” atau pelaku bisnis media massa itu sendiri yang seharusnya menghayati dan mengerti fungsi dan peran ideal media massa itu sendiri. Jika berbicara motif politik, jangankan di bisnis pers atau media massa, sesungguhnya di setiap lini baik pemerintah maupun swasta diyakininya pasti ada motif politik dibalik organisasinya. Jangan aneh melihat ini karena di luar negeri khususnya Amerika Serikat pun begitu, sebagai negara yang terkenal dengan “demokrasinya” lebih dulu dibanding kita.

Pers atau media massa akan berperan secara ideal ketika “Kita” menemukan konglomerasi media yang bisa benar-benar menjadikan media massanya

untuk kepentingan publik, tidak tergoda untuk mengatasnamakan kepentingan kelompok atau golongan dalam mengoperasikan media massanya. Terkait hal ini, Elman juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap fungsi “Dewan Pers” dan “Komisi Penyiaran Indonesia” yang belum optimal dalam menjalankan fungsi kontrolnya. Seharusnya Dewan Pers dan KPI dengan “Kacamata Kuda-nya” dapat membatasi media massa yang “bandel” bukan hanya sekedar menimbulkan wacana dan membela “yang bayar”.

Masyarakat itu selalu punya pilihan dalam melihat fenomena ini. Sesungguhnya media massa itu hidup dalam pilihan masyarakat. Jika “anda” ingin mematikan bisnis sebuah Koran, mudah caranya dengan “*stop*” membeli Koran itu. Jika “anda” ingin mematikan bisnis stasiun televisi tertentu, sama caranya dengan “*Stop*” menonton program tayangan televisi tersebut. Sebenarnya itulah tantangan media massa saat ini yaitu berlomba-lomba untuk “merayu” masyarakat agar selalu memilih kita.

Sebagai akademisi dan praktisi, Eko Supriatno meyakini betul bahwa apa yang dipelajari secara teoritis belum tentu berjalan seiring dengan praktek di Industri. Berbicara tentang media massa, Industri ini pasti mempunyai benturan “kepentingan”, baik itu kepentingan *investor*, kepentingan media, kepentingan politis dan kepentingan masyarakat. Maka dari itu, profesi “wartawan” tidak bisa “netral” karena tidak lepas dari “kepentingan”.

Secara ideal fungsi pers adalah informasi, pendidikan, hiburan dan alat kontrol sosial. Dengan fenomena kepentingan tadi, maka peran pers sebagai alat kontrol sosial tidak bisa berjalan 100 persen. Kita hidup di persaingan industri media massa yang begitu ketat. Jika anda tidak suka, silahkan anda buat sendiri media massa sesuai versi ideologi anda! Sebagai contoh : Apakah *Murdock* pernah dikritisi *Fox*? (itulah yang dinamakan entitas bisnis). Namun beliau meyakini ditengah persaingan yang begitu ketat dan ke arah oligopoli ini masih ada media massa yang dapat menjaga independensinya.

Siapakah yang harus bertanggungjawab untuk semua ini? Jawabannya adalah kita semua, sejatinya kita harus kembali pada aturan main yang ada. Media Massa tidak bisa dihindari, merupakan bantuk entitas bisnis juga. Ada banyak karyawan yang harus dihidupi. Hidup itu memang penuh keberpihakan. Untuk itu, konsisten saja dengan keberpihakan kita. Dan pada prakteknya kita harus berpihak pada kebenaran. Untuk itu penegakan hukum perlu diperjelas disini. Jika memang tidak boleh, maka segera beri peringatan kepada media massa tersebut.

Secara teoritis dan praktek, *owner* atau konglomerasi media pun tidak boleh campur tangan dalam menentukan layak atau tidaknya suatu berita itu siar kepada masyarakat. Itulah gunanya rapat redaksi dan pemimpin redaksi di media massa. Namun kami dapat menerjemahkan kira-kira apa

saja yang membuat *owner* atau pemilik media massa kami tidak marah-marah dengan berita kami.

Jika media massa ingin berdiri di satu konten saja akan susah baginya bersaing di industri ini, susah untuk bertahan dan *exist* apalagi kalau baru berdiri untuk menghadapi 13 *group* media massa terbesar tadi. Kemudian peningkatan substansi haruslah ada pada media massa baru tersebut atau media massa yang masih kecil itu. “Substansi” yang berbeda itu adalah “menjawab selera pasar”. Sebagai contoh : dulu format berita “*Straight News*” adalah format *standard* dari media massa, kini selera pasar berubah kepada format “*soft news*” dan “*semi features*”. Masyarakat tidak menyukai lagi dengan format kaku (*5W+1H*) saja. Menurut riset “*business development*” dari *Media Group* sendiri, kini selera pasar mengutamakan “Makna” atau harus ada “*Public Meaning*” dalam setiap pemberitaan yang disampaikan. Kini *interpretative news* lebih disukai pasar, yang menyajikan pemaknaan dari suatu berita. (magnanya apa dari data dan sumber yang kita punya).

Jika media massa ingin bertahan di tengah kehadiran 13 *group* konglomerasi tersebut haruslah tampil beda dan kreatif dalam isi. Jika tidak demikian, siap-siaplah tergilas dengan mereka. Diakui Eko, penurunan omzet untuk Harian Media Indonesia pun terjadi saat ini terkait perkembangan teknologi dan digitalisasi semakin pesat. Namun Eko meyakini bahwa “*printed media*” tidak akan punah melainkan ter-*segmented* saja. Sebagai wartawan yang lahir dan dibesarkan dari media cetak, keberatan jika di masa depan surat kabar akan punah sama sekali karena surat kabar dipercayainya masih mempunyai kelebihan dan karakter unik yang berbeda dengan media massa lainnya.

Kenikmatan tersebut adalah “kedalaman” suatu informasi yang kita peroleh dengan bentuk berita yang *in depth reporting*, berbeda dengan radio dan Televisi yang hanya selintas dengar. Selain itu sifatnya yang mudah didokumentasikan dan dikliping berbeda dengan TV dan radio, walau dalam aktualitas surat kabar tidak bisa menandinginya. Apalagi media *on-line*, dia unggul di kecepatan namun informasi yang disampaikan tidak mendalam dan tidak berurutan (hanya *what, when, why*).

Menurut Eko, perkembangan media massa di Indonesia saat ini belum merata ke seluruh wilayah Indonesia, masih tersentral di Jakarta. Penyebabnya adalah pusat pemerintahan dan pusat perekonomian masih di Jakarta sehingga pangsa pasar yang paling besar ada di Jakarta. Permasalahan ketidakmerataan ini tidak bisa disalahkan pemerintah sepenuhnya karena melihat keadaan geografis wilayah Indonesia yang sangat luas. Itulah celah media massa baru jika ingin berdiri dan meniti bisnis.

Media massa saat ini harus berpedoman pada rumus “*Pandai-pandailah Meniti Buih*” jika ingin bertahan dan *exist* di industri media massa

Indonesia. Maksudnya adalah jika anda tidak ingin tenggelam, maka anda tidak boleh makan buih terlalu banyak. Kalau harus pukul, ya pukul-lah, kalau harus puji, maka pujilah, tidak usah mencari kesalahan orang lain. Saat ini, masyarakat sudah muak dengan cara mengkritisi yang terlalu ekstrem, akan menjadi tidak elok saat terlalu banyak mengkritisi tanpa solusi yang jelas. Mengkritisi dengan cara terbaik dapat dilihat dari karakter bahasa media massa tersebut.

Perspektif Kubu Regulator

Kepemilikan media yang hanya berada di tangan beberapa kelompok bisnis ini menimbulkan banyak permasalahan, seperti munculnya tarik ulur antara idealisme pers, kepentingan bisnis dan kepentingan politik. Media massa menjadi lahan bisnis yang sangat menguntungkan terutama untuk mereka yang mencari kekuasaan. Media massa tidak lagi berfungsi sebagai penyampai informasi dengan pesan-pesan realitas sosial.

Sebagian besar pemilik media juga memiliki bisnis lain di luar media. Maraknya para konglomerat yang berekspansi ke dunia industri media ini, oleh Firdaus Cahyadi, Direktur Yayasan Satu Dunia dijelaskan bahwa ini bertujuan untuk membangun opini publik untuk melindungi bisnis mereka yang berada di luar media, seperti pertambangan, perkebunan dan yang lain dari gangguan masyarakat dan Negara. Dan juga untuk mempengaruhi opini dan memperlebar ruang kekuasaan dalam bernegosiasi dengan Negara dan masyarakat.

Pada masa Orde Baru, orang-orang kaya berlindung dibalik pemerintah. Ketika Orde Baru tumbang, mereka harus melindungi dirinya sendiri. Bentuk perlindungannya adalah dengan membangun media, untuk membangun opini publik. Maka itulah, mengapa para konglomerat berlomba-lomba untuk membuat media. Mereka memiliki tambang, perkebunan, dan industri yang lain, yang rentan konflik dengan masyarakat. Media menjadi cara untuk melindungi bisnisnya. (Firdaus Cahyadi, Direktur Eksekutif Yayasan Satu Dunia, Wawancara, 25/9/15).

Saat pemilik media menguasai banyak saluran media, seringkali mereka melakukan “*self promotion*”. Pemilik media akan melakukan pencitraan pada media yang satu terhadap bisnis media mereka yang lain. Media juga cenderung mempromosikan bisnis mereka masing-masing. Seperti ketika menonton TV, maka pemirsa di dorong untuk menggunakan dan memanfaatkan bisnis mereka yang lain.

Bahayanya, ketika di dalam salah satu bisnis tersebut ada permasalahan, maka pemilik media dapat dengan mudah membungkam pemberitaan terkait permasalahan tersebut. Atau, pemilik media akan membuat berita sesuai dengan versi mereka. Pemberitaan hanya berdasar pada satu sisi saja, tidak

cover both sides. Sehingga arah pemberitaan akan menguntungkan para pemilik media. Dan ujung-ujungnya, media menjadi alat untuk mempertahankan diri para pemilik modal.

Dalam kasus lumpur Lapindo, group media milik Aburizal Bakrie seperti TV One, ANTV dan *vivanews.com* membuat pemberitaan yang menguntungkan mereka. Kalaupun ada suara dari masyarakat, mereka mengambil masyarakat yang mendukung mereka. Sama juga dengan pemberitaan terkait dengan Disneyland Bogor yang mencaplok tanah masyarakat Gombong. Hampir semua media memberitakan dari sisi MNC, sedikit sekali yang melihat permasalahan tersebut dari sisi masyarakat. Kecuali Jawa Pos Network, Tempo dan Kartini. (Firdaus Cahyadi, Direktur Eksekutif Yayasan Satu Dunia, 25/9/15).

Kepemilikan media yang hanya di tangan segelintir orang ini sangat dikhawatirkan akan terjadi penyeragaman isi siaran. Pemberitaan yang dihasilkan oleh media-media tersebut akan cenderung sama, terutama pada media yang berada dalam satu payung bisnis. Berita yang muncul di media cetak, akan diulas kembali di TV mereka, kemudian ditampilkan ulasannya di media *online* milik group tersebut.

Terkonsentrasi kepemilikan media hanya di tangan beberapa kelompok ini tentu saja mengancam hak warga untuk mengakses informasi dan mendapatkan informasi yang jujur dan netral. Selain warga disuguhi informasi dan tayangan yang seragam, warga tidak memiliki pilihan lain. Ketika warga mengganti tombol *remote* ke televisi yang lain, model informasi yang didapatkan juga hampir sama.

Publik tidak punya pilihan. “Kebebasan ada di tangan anda, jika anda tidak suka dengan acara di salah satu televisi, anda bisa mengganti dengan menekan tombol ke stasiun TV lain” itu salah besar. Karena ketika berganti tombol pun, tidak akan menyelesaikan masalah, karena informasi yang disampaikan juga seragam. Acara televisi yang ditampilkan juga seragam. (Firdaus Cahyadi, Direktur Eksekutif Yayasan Satu Dunia, Wawancara, 25/9/15).

Saat membaca struktur pasar media massa di Indonesia, maka harus memahami sejarah media di Indonesia. Andreas Harsono menjelaskan bahwa pada awal Abad 20 sampai jaman penjajahan Jepang, surat kabar terbesar berada di kota Semarang. Setelah itu, menyusul kota-kota yang lain, seperti Surabaya, Batavia, Padang, Medan, dan Manado.

Kepentingan bisnis dalam konglomerasi media sangat besar, mengalahkan jurnalistik itu sendiri. Andreas Harsono, mantan Direktur Yayasan Pantau memaparkan bahwa di era kepemilikan media yang terkelompok ke dalam beberapa kelompok besar seperti saat ini, tak ada persaingan dalam segi jurnalistik. Di televisi misalnya, yang ada adalah

persaingan untuk memperebutkan ceruk-ceruk iklan di jam tayang paling sibuk dengan menghadirkan film-film atau sinetron-sinetron. Sementara program-program pemberitaan justru banyak tergeser pada jam-jam tidak banyak dilirik penonton.

Di era konglomerasi media seperti saat ini, tak ada persaingan di tataran jurnalistik. Justru di TV-TV swasta, saat ini mereka bersaing untuk menayangkan film-film *box office* untuk menarik para penonton. Bahkan, ada di salah satu stasiun TV, pemiliknya langsung yang memilih film-film *box office* yang ditayangkan di jam-jam yang memiliki rating tinggi. Jadi, persaingannya justru bukan di jurnalistiknya. (Andreas Harsono, Wawancara, 25/9/15).

Hal lain yang disoroti Andreas Harsono adalah saat ini media-media di Indonesia sangat Jakarta sentris. Pemberitaannya hampir semuanya menggunakan perspektif Jakarta. Dampaknya, daerah yang jauh dari Jakarta akan jarang mendapatkan pemberitaan.

Media-media kita sangat Jakarta sentris. Tepatnya Palmerah sentris. Palmerah ini seperti menjadi pusat media dijalankan. Di sini Group Kompas semua berada. Ada Jakarta Post. Kantor Tempo yang baru juga ada. Indo Pos ada di sebelahnya. Tak jauh dari Palmerah ada SCTV. RCTI, Metro TV, Indosiar juga tidak jauh dari Palmerah. Juga dalam pemberitaan. Media-media kita masih Jakarta sentris. Informasi yang ditampilkan kebanyakan adalah berita-berita yang berkaitan dengan penduduk Jakarta. Semua perspektif Jakarta. Dampaknya, daerah yang jauh dari Jakarta tidak mendapatkan porsi pemberitaan yang besar. (Andreas Harsono, Wawancara, 25/9/15). Andreas juga menjelaskan bahwa munculnya kelompok-kelompok media tidak terlepas dari adanya kelompok-kelompok yang ingin berkuasa dan adanya modal. Dan disinilah terjadi pertarungan antara pertimbangan bisnis dan nilai-nilai jurnalistik.

Namun Andreas masih melihat adanya peluang untuk melawan industri-industri media yang makin membesar tersebut. Banyak upaya-upaya di tingkat lokal yang dilakukan. Seperti di Jambi muncul media independen. Begitu juga di internet, muncul *oase* baru seperti IndoProgress, Mojok, dan Pindai yang berupaya mengambil celah persaingan industri media dan mengisinya dengan konten yang beragam.

Munculnya kelompok-kelompok media besar dalam industri media di Indonesia pasca reformasi, Menurut Nezar Patria merupakan konsekuensi dari jalan yang diambil oleh republik ini. Setelah reformasi, terjadi liberalisasi di berbagai sektor. Ini akibat keputusan politik yang diambil. Dalam suasana liberalisasi seperti itu, memungkinkan semua warga tanpa kecuali untuk membuat media. Dalam hal ini termasuk para pemilik modal dan yang tidak memiliki modal. Para pemilik modal mulai berhimpun, baik yang sedang melakukan

bisnis di media, maupun para pemilik modal yang mulai masuk ke dalam industri media setelah adanya reformasi. Ini termasuk para konglomerat-konglomerat yang pada mulanya inti bisnisnya di bukan di ranah media, seperti di pertambangan, perkebunan, perbankan dan lain-lain, bersama-sama mendirikan satu unit media.

Sentralisasi kepemilikan media yang hanya ada di tangan beberapa kelompok tersebut akan mulai bermasalah ketika terjadi konflik kepentingan. Terutama *group-group* yang melakukan ekspansi secara horizontal dengan memiliki unit usaha bermacam-macam dan memberikan dampak pada bisnis-bisnis vertikalnya, seperti media dan yang lain. Ini yang menjadi permasalahan.

Menurut Nezar, belum ada peraturan yang mengatur kepemilikan media. Kecuali di televisi. Dalam UU Penyiaran Tahun 2002, dijelaskan tentang pembatasan TV swasta bersiaran secara nasional. Jangkauan siaran dibatasi sesuai dengan wilayah yang ditetapkan. Ini merupakan semangat desentralisasi untuk memperkuat otonomi daerah. Sistem *relay* tidak lagi digunakan dan diganti dengan sistem TV berjaringan. TV-TV Jakarta tidak lagi diperbolehkan bersiaran secara nasional. Mereka harus bekerja sama membangun jaringan dengan TV-TV lokal.

Semestinya pemerintah mengatur kepemilikan media. Kepemilikan media hanya boleh memiliki dua *platform* saja, misalnya pemilik media hanya boleh memiliki cetak dan *online*, atau *online* dan penyiaran. Harusnya tidak boleh masuk ke dalam seluruh *platform* media. Kalau hal ini tidak diatur, maka diversifikasi kepemilikan tidak akan terjadi, sehingga penguasaan kanal-kanal hanya dimiliki oleh kelompok-kelompok bermodal besar saja. Dan ini akan mengakibatkan munculnya konflik kepentingan.

Di Dewan Pers sendiri belum pernah menerima pengaduan terkait dengan permasalahan konflik kepentingan akibat adanya konglomerasi media ini. Yang sering muncul adalah pengaduan terkait pelanggaran kode etik. Misalnya ketika terjadi ketidakakurasian dalam pemberitaan. Dan biasanya disebabkan oleh bias kepemilikan, atau pemberitaan yang tidak seimbang. Dan ini banyak terjadi pada masa pemilu. Pada pemilu lalu sejumlah ada pengaduan yang masuk, baik dari masyarakat, *media watch*, hingga warga konsumen media yang mengkritik media tersebut.

Upaya untuk menjaga independensi, menurut Nezar dapat dilakukan dengan menegakkan kode etik jurnalistik. Karena dalam kode etik itu sendiri sudah tercantum sikap independen dari seorang jurnalis.

Ada kerancuan antara **independensi** dengan **netralitas**. Nezar menyampaikan bahwa independensi adalah proses pencarian berita yang dilakukan dengan otonomi *newsroom* dan wartawan untuk mendapatkan fakta-fakta dan data-data tanpa

dipengaruhi oleh apapun dalam kepentingan jurnalistik. Netralitas merupakan sikap wartawan dalam melihat suatu masalah dengan subjektif wartawan dalam menilai suatu peristiwa.

Contohnya dalam pemilu lalu, ada dua kandidat calon presiden. Satu media memberikan pendapatnya bahwa Indonesia lebih sesuai jika dipimpin oleh calon A dibandingkan calon B. Media bisa melakukan hal tersebut di rubrik opini. Tetapi itu tidak boleh dilakukan atau merembes pada pemberitaan-pemberitaan yang faktual. Fakta dan opini tidak boleh bercampur. Bahayanya, netralitas menjadi tidak sah kalau merembes pada pemberitaan atas fakta-fakta. Dalam pemberitaan tidak boleh memberitakan hanya salah satu calon saja, atau menjelek-jelekkan salah satu calon. Pemberitaan harus berdasarkan fakta dan memberitakan secara professional.

Media sah-sah saja sejauh tidak mencampurkan antara fakta dan opini. Karena media tidak hanya memberikan berita, seperti *aggregator* di dalam komputer. Tetapi media juga merupakan bagian dari kebebasan berpendapat sehingga media memiliki hak untuk memberikan pandangan kepada publik. Seperti halnya tajuk rencana suatu media, yang hal tersebut merupakan sikap dari media. Kepemilikan suatu media perlu dilihat, apakah kepemilikan tersebut dalam mendukung keputusan pemerintah, terhadap suatu gerbong bisnis, atau kepemilikan terhadap akal sehat.

Bagi Nezar Patria, konglomerasi media sejauh bisa memisahkan kepentingan-kepentingan ekonomi politik di belakang jejaring usaha di balik media tersebut, maka itu masih boleh-boleh saja. Konglomerasi media tidak bisa dihambat jika tidak ada persetujuan nasional untuk membatasi kepemilikan media. Salah satu jalan adalah melakukan *review* atas ijin-ijin usaha dalam bidang media agar diversifikasi konten bisa terjamin dengan peraturan-peraturan usaha media.

Dewan Pers hanya bisa memberikan wacana tersebut, karena pembuatan kebijakan ada di tangan DPR. Dewan Pers akan memberikan usulan kepada komunitas media dan publik untuk mengajukan *draft* UU yang membatasi kepemilikan dan intervensi pemilik ke dalam *newsroom*.

Dalam iklim yang cukup liberal dimana setiap orang bisa membuat media dan bisa melakukan intervensi kepentingan ekonomi politik ke dalam ruang redaksi, jika tidak ada pembatasan, maka *newsroom* harus bersikap independen. Untuk itu, Nezar mengatakan harus ada jaminan yang kuat dari Undang-Undang untuk menolak intervensi tersebut, demi kepentingan publik.

KESIMPULAN

Struktur pasar media massa Indonesia saat ini cenderung bergerak ke oligopoli. Penelitian sebelumnya menunjukkan pemusatan kekuatan pada

13 konglomerasi media nasional dimana beberapa dari mereka aktif di partai politik. Hal ini berpengaruh pada praktik pers bekerja saat ini dalam membentuk opini publik cenderung menguntungkan pengiklan dan kepentingan konglomerasi. Teori Ekonomi Politik Media (Moscow, 1996) digunakan dalam penelitian ini yang terdiri atas komodifikasi, spasialisasi dan strukturasi.

Dari pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan: Dialektika terjadi antara pihak media partisan dengan regulator media massa pada beberapa hal dimana Media Partisan menganggap masyarakat Indonesia adalah khalayak yang sudah pintar dan aktif dalam mengkonsumsi media sementara regulator beranggapan khalayak masih pasif dan mereka tidak punya pilihan dalam mengkonsumsi media. Independensi dan Netralitas adalah konsep yang berbeda dalam praktik pers, sehingga pers sebagai manusia biasa tidak ada yang dapat netral keseluruhan. Regulasi batasan kepemilikan media belum diatur dalam undang-undang kecuali hanya media televisi, sehingga perlunya pemerintah mengkaji ulang tentang aturan batas kepemilikan media bagi seseorang agar tidak terlalu bebas menggunakan badan usaha media massanya untuk menguntungkan kepentingan pribadi atau golongan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwyny, Farouk Abdullah. "Ekonomi Politik sebagai Sebuah Sistem", diakses dari <https://www.islampos.com/ekonomi-politik-sebagai-sebuah-sistem-181995/> pada tanggal 1 Oktober 2015, pukul 15.56
- Creswell, John W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Traditions*. USA : Sage Publication Inc.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Hirst, Martin & Roger Patching. (2005). *Journalism Ethics : Arguments and Cases*. Melbourne : Oxford University Press.
- Kovach, Bill, dan Tom Rosentiel. (2006). *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta : Yayasan Pantau.
- Kriyantono, Rachmat. (2012). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Lim, M. (2011). *@crossroads: Democratization & Corporatization of Media in Indonesia. Participatory Media Lab. asu.edu*, http://participatorymedia.lab.asu.edu/files/Lim_Media_Ford_2011.pdf
- Meliála, Robbikal Muntaha. (2018a). Sikap Metro TV Dalam Persaingan Pasar Oligopoli. *Jurnal Akrab Juara* 3(3), 38-52.
- Meliála, R.M. (2018b). Analisis Model Super "A" pada Iklan Promosi Kampus di Televisi. *Jurnal Studi Komunikasi*, 2(2).doi:10.25139/jsk.v2i2.397
- Meliála, Robbikal Muntaha. (2017). Representasi Superioritas Pada Iklan Promosi Perguruan Tinggi Di Televisi (Studi Semiotik Pierce Pada Iklan BSI Grup). *Jurnal IKRA-ITH HUMANIORA*, 1(2), 76-85.
- Moscow, Vincent. 1996. *Political Economy Communication*. SAGE Publication.
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta : PT Lkis Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Ruslan, Rosady. (2008). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Smith, Adam "Pembahasan mengenai pengertian ekonomi politik", diakses dari <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-ekonomi-politik-menurut-pakar.html#>, pada tanggal 1 Oktober 2015, pukul 15.45
- Susanti, Santi & Koswara, Iwan. (2018). Pemertahanan Warisan Budaya Bangsa Melalui Seni Tradisional. *Jurnal Akrab Juara*, 3(3), 62-74.
- Yoedjadi, Muhammad Gafar dan Muhammad Adi Pribadi. (2017). Upaya Redaksi Televisi Menjaga Objektivitas Dalam Pemberitaan Pilkada DKI Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(2), 275-285.

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DUSUN DALAM MERENOVASI MASJID BERSEJARAH

Syah Amin Albadry,

albadry1489@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio

ABSTRAK

Salah satu tuntutan terhadap Analisis Kebijakan Pemerintah Dusun Dalam Merenovasi Masjid Bersejarah Al-Falah Dusun Empelu adalah bentuk masjid yang berubah total dari sebelumnya. Ini berarti pemerintah dusun memiliki tanggung jawab yang besar dalam pembangunan masjid, termasuk penyediaan sarana dan prasarana masjid.

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah dusun dalam merenovasi masjid bersejarah Al-Falah Dusun Empelu juga hambatan serta upaya pemerintah dusun dalam merenovasi masjid bersejarah Al-Falah Dusun Empelu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dusun dalam merenovasi masjid bersejarah Al-Falah Dusun Empelu. Populasi penelitian adalah populasi yaitu Rio Dusun Empelu dan perangkat dusun, tokoh agama/pegawai syara' dan beberapa masyarakat yang ada di Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo. Sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampel bertujuan, dimana yang dijadikan sampel adalah pihak-pihak yang berkompeten dengan objek penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah dusun dalam merenovasi masjid bersejarah belum maksimal, hal ini dikarenakan oleh berbagai hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya anggaran (biaya) dalam merenovasi masjid bersejarah menyebabkan pembangunan masjid jadi terbengkalai; dan perbedaan pendapat antara pemerintah dusun dengan masyarakat tentang konsep bangunan, hal ini mengakibatkan masjid berubah total dari sebelumnya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dusun dan masyarakat dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi ialah menetapkan iuran bagi masyarakat dusun untuk melanjutkan pembangunan renovasi masjid; dan menyatukan pendapat antara pemerintah dusun dengan masyarakat dalam merenovasi masjid bersejarah, agar terwujudnya masjid yang kita inginkan selama ini.

Kata kunci: Analisis, kebijakan, masjid bersejarah

ANALYSIS OF THE GOVERNMENT POLICY IN THE INSIDE RECOVERING HISTORICAL MOSQUE

Syah Amin Albadry,

albadry1489@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio

ABSTRACT

One of the demands of the Hamlet Government Policy Analysis in Renovating the Al-Falah Historical Mosque in the Empelu Hamlet was a mosque that changed completely from before. This means the hamlet government has a big responsibility in the construction of mosques, including the provision of mosque facilities and infrastructure.

The purpose of this research was to find out the village government policy in renovating the historic Al-Falah mosque in Empelu Hamlet as well as the obstacles and efforts of the hamlet government in renovating the historic Al-Falah mosque in Empelu Hamlet. The research method used is descriptive method with a qualitative approach that aims to determine the policy of the village government in renovating the historic Al-Falah mosque in Empelu Hamlet. The population of the research was population, namely Rio Hamlet Empelu and hamlet devices, religious leaders / employees of the Shara 'and some communities in Empelu Hamlet, Tanah Sepenggal District, Bungo Regency. The research sample used purposive sampling technique or purposive sampling, in which the samples were those who were competent with the object of research.

The results of the research and discussion illustrate that the policy of the village government in renovating historic mosques has not been maximized, this is due to the various obstacles faced, including the lack of budget (cost) in renovating the historic mosque causing the construction of the mosque to be abandoned; and differences of opinion between the hamlet government and the community about the concept of building, this resulted in the mosque changing completely from before. The efforts made by the hamlet and community governments in overcoming the obstacles faced were to set contributions for the hamlet community to continue the construction of mosque renovations; and bringing together opinions between the hamlet government and the community in renovating the historic mosque, so that the mosque that we want so far.

Keywords: Analysis, policy, historic mosque

PENDAHULUAN

Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat sosial dan juga pusat pengembangan kebudayaan Islam. Selain berfungsi sebagai tempat beribadah, masjid berguna juga bagi aktivitas syiar Islam yang bertujuan memajukan umat Islam dalam segala aspek kehidupan baik sosial budaya maupun politik.

Masuknya Islam dan perkembangannya di Indonesia telah memberikan pengaruh pada alam pikiran kehidupan masyarakatnya. Pengaruh tersebut senantiasa tidak hanya terbatas pada bidang mental spiritual saja, tetapi juga dalam wujud pola pikir serta kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu bentuk pengaruh itu ditandai dengan munculnya seni bangunan Islam berupa bangunan masjid.

Bangunan masjid merupakan salah satu wujud penampilan budaya Islam. Masjid muncul sebagai pusat kegiatan Islam yang merupakan perpaduan dari fungsi bangunan sebagai unsur arsitektur Islam yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang diperintahkan oleh Tuhan sebagai tempat pelaksanaan ajaran Islam, dengan bangunan sebagai ungkapan tertinggi dari nilai-nilai luhur suatu kehidupan manusia yang juga melaksanakan ajaran Islam. Maka tampillah arsitektur masjid dengan segala kelengkapannya, dengan bentuk, gaya, corak, dan penampilannya dari setiap kurun waktu, setiap daerah, lingkungan kehidupan dengan adat dan kebiasaan, serta latar belakang manusia yang menciptakannya.

Bentuk bangunan masjid di Indonesia dari bentuk semula yang sederhana berupa musholla, langgar atau surau kemudian mengalami perkembangan bentuk yang

lebih sempurna. Perkembangan Islam di Indonesia banyak mewariskan peninggalan bersejarah antara lain masjid-masjid lama. Masjid-masjid lama yang ada di Indonesia bermacam-macam bentuknya sesuai kebudayaan yang mempengaruhinya.

Sebagai contohnya, yaitu Masjid Al-Falah yang terletak di Dusun Empelu, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Masjid tua dengan bangunan bergaya melayu itu dibangun pada tahun 1812. Pengerjaan masjid tersebut dilakukan secara bertahap. Pendirian awal Masjid Al-Falah dikerjakan oleh Rio (sebutan untuk kepala desa/dusun) Agung bersama masyarakat, atas perintah Pangeran Anom. Saat didirikan, bentuk bangunan masjid tersebut masih berbentuk rumah panggung yang terdiri dari beberapa tiang, beratap daun rumbia, dengan dinding dari kayu, dan lantai dari bilah, yang pada masa itu disebut sebagai surau Al-Falah.³

Pada tahun 1827, bangunan surau Al-Falah direhab menjadi bangunan berbatu dengan tembok dari semen dan diubahlah menjadi Masjid Al-Falah. Pada tahun 1837, bangunan masjid kembali direhab. Saat itu, bangunan mulai tampak indah, dengan keindahan seni arsitektur serta interior yang cukup menarik. Selain itu, terkandung pula simbol-simbol atau makna-makna yang cukup luas dari bentuk fisik bangunan.⁴

Perkembangan tahun demi tahun membuat bangunan ini semakin tua. Seiring dengan hal tersebut dan penggantian rio, maka timbullah keinginan untuk merenovasi Masjid Al-Falah.

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Rifa'i Sebagai Tokoh Agama dan Mantan Pengurus Masjid Al-Falah Dusun Empelu Tahun 2010, Tanggal 04 April 2016

⁴ *Ibid*,

Renovasi tersebut berdasarkan musyawarah dusun dan dilakukan pada tahun 2014. Di dalam pembangunan renovasi tersebut, maka terbentuklah suatu kepanitiaan, yaitu panitia renovasi masjid.

Di dalam rancangan renovasi itu, ada 2 konsep bangunan yang mengajukan untuk direnovasi yaitu :⁵

1. Konsep dari H. Arfan yang merupakan salah satu donatur untuk Dusun Empelu dan anak dari H. Hasan Bin H. Tahir (Mantan Bupati Bungo Tebo)
2. Konsep dari kepanitiaan yang merupakan masyarakat Dusun Empelu

Berdasarkan konsep dari H. Arfan, struktur dan bentuk masjid tidak berubah tetapi dengan biaya yang cukup tinggi, sehingga kemampuan masyarakat untuk biaya tersebut tidak mencapai. Sedangkan dari kepanitiaan, dibuatlah konsep sendiri dengan biaya yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah, yaitu :Bagaimana kebijakan pemerintah dusun dalam merenovasi masjid bersejarah Al-Falah Dusun Empelu?

LANDASAN TEORI

Kebijakan pada umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Namun, kebijakan bukanlah sekedar suatu keputusan yang ditetapkan. Rose mengartikan kebijakan lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, daripada hanya

sekedar suatu keputusan. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Friedrich yang memandang kebijakan sebagai suatu tindakan yang disarankan mengenai perorangan, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi atau dimanfaatkan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu maksud. Anderson mengartikan kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan bertujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor berkenaan dengan suatu masalah atau suatu hal yang menarik perhatian.⁶

Ciri-Ciri Kebijakan

Ciri-ciri penting dari suatu kebijakan adalah:⁷

1. Saling ketergantungan, suatu masalah kebijakan mempunyai keterkaitan dengan masalah kebijakan dibidang lainnya
2. Subyektivitas, artinya masalah kebijakan timbul dalam suatu lingkungan tertentu yang berupa situasi masalah
3. Sifat buatan dari masalah, artinya masalah kebijakan merupakan produk dari penilaian subyektif manusia, dari defenisi yang sah dari kondisi sosial yang obyektif, dan karenanya harus diubah secara sosial melalui policy (kebijakan)
4. Dinamika, artinya masalah kebijakan senantiasa berubah, sejalan dengan perubahan sosial dan kondisi. Masalah kebijakan tidak bersifat konstan

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ilyas Sebagai Ketua Panitia Renovasi Masjid Al-Falah Dusun Empelu, Tanggal 05 Mei 2016

⁶ Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, Hal. 36

⁷ *Ibid*, Hal. 8

Unsur-Unsur Kebijakan

Secara konseptual, kebijakan publik adalah usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. konsep ini memperlihatkan adanya kandungan empat unsur pokok yaitu:⁸

- a. Unsur usaha dalam kebijakan adalah dimaksudkan bahwa kebijakan itu terjadi sebagai usaha yang dilakukan, usaha mana bisa dalam bentuk tindakan (kelakuan atau perilaku atau perbuatan) dan bisa dalam bentuk pemikiran seperti pendapat atau gagasan.
- b. Unsur tujuan sangatlah penting sebab dengan menegaskan kehendak yang dinyatakan atas dasar pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah membedakannya dengan tujuan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku non pemerintah. Pemerintah dapat berbuat karena kekuasaan yang dimilikinya dan kekuasaan itu berada dalam wilayah yang disebut kedaulatan suatu daerah atau negara.
- c. Unsur sarana. Begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan antara lain, tentang besar atau luasnya sarana dibanding dengan tujuan yang dicapai. Jika sarana lebih besar ketimbang tujuan, hal itu memerlukan pertimbangan rasional.
- d. Unsur waktu adalah dimaksudkan sebagai suatu keadaan yang berkenaan dengan jangka waktu pencapaian tujuan, penggunaan sarana dan kegiatan atau upaya yang dilakukan.

⁸ Faried Ali dan Andi Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal. 15-18

Waktu dalam isi kebijakan selalu berkaitan dengan tiga unsur lainnya dan selalu terkait dengan kecepatan terlaksananya kegiatan dan tercapainya tujuan.

Model-Model Kebijakan Pemerintah

Ada beberapa model kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut :⁹

1. Model Elit
Yaitu pembentukan kebijakan pemerintah hanya berada pada sebagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa.
2. Model Kelompok
Berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tertentu yang berkuasa, maka pada model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan yang saling berebutan mencari posisi dominan.
3. Model Kelembagaan
Yang dimaksud dengan kelembagaan di sini adalah kelembagaan pemerintah.
4. Model Proses
Model ini merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi.
5. Model Rasialisme
Dalam model ini segala sesuatu dirancang dengan tepat, untuk meningkatkan hasilnya untuk mencapai tujuan secara efisien.
6. Model Inkrementalisasi
Model ini berpatokan pada kegiatan masa lalu dengan sedikit perubahan. Dengan demikian hambatan seperti

⁹ Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, Hal. 146-148

waktu, biaya dan tenaga untuk memilih alternatif dapat dihilangkan.

7. Model Sistem

Model ini beranjak dari memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi kebijakan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu bermaksud untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi dengan 7 orang informan yang terdiri dari 1 orang key informant dan 6 orang ordinary informant. Adapun tahap prosedur dalam analisis data sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian
- b. Melakukan pemeriksaan data yang didapat apakah sesuai dengan diharapkan
- c. Pengelompokkan data-data guna menjawab pertanyaan penelitian
- d. Melaksanakan pembahasan dan perumusan terhadap data yang didapatkan
- e. Mengambil kesimpulan akhir terhadap data yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pada umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Namun, kebijakan bukanlah sekedar suatu keputusan yang ditetapkan. Namun kebijakan yang ditetapkan tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan tersebut dapat berupa tenaga, pikiran maupun materi demi tercapainya suatu keinginan yang telah ditetapkan. Begitu pula renovasi yang dilakukan terhadap masjid Al-Falah Dusun Empelu, yang masih sangat membutuhkan dana yang cukup untuk pembangunan masjid tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Marzuki selaku Rio di Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal mengatakan bahwa, "Pelaksanaan renovasi masjid telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, namun dalam perjalanan pembangunannya terhambat karena kurangnya dana sumbangan baik dari pemerintah kabupaten, kecamatan, maupun partisipasi dari masyarakat dusun itu sendiri."¹⁰

Kemudian ia menambahkan bahwa, "Melihat kondisi bangunan yang terbengkalai, maka kami (aparatur pemerintahan dusun) bersama pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil kebijakan dalam hal ini yaitu menetapkan iuran bagi setiap masyarakat dusun yang telah ditentukan setiap tingkatan-tingkatannya."¹¹

Ilyas selaku ketua panitia renovasi Masjid Al-Falah membenarkan apa yang dikatakan oleh Marzuki, dan ia

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Datuk Rio (Marzuki) Dusun Empelu, Tanggal 03 Mei 2016

¹¹ *Ibid*,

menambahkan bahwa, “Kebijakan itu diambil karena melihat dana dari kas dusun tidak mencukupi untuk pembangunan masjid, sehingga jalan satu-satunya agar pembangunan tetap berjalan ialah dengan menetapkan iuran bagi masyarakat dusun.”¹²

Ditambah lagi oleh Sekretaris Panitia Renovasi Masjid Al-Falah, bahwa “Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam pembangunan renovasi masjid maka dari iuran itulah nantinya dapat melihat sejauh mana masyarakat dusun peduli terhadap tempat peribadatan.”¹³

Jadi, berdasarkan hasil analisis saya, kebijakan perlu dijalankan untuk meningkatkan proses pembangunan secara bertahap. Dukungan masyarakat itu sangat dibutuhkan demi kelancaran pembangunan tersebut. Untuk pemerintah dusun, di sinilah perannya dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi tantangan yang berkaitan dengan kelancaran pembangunan yang ada di suatu tempat.

Keberhasilan pencapaian tujuan untuk merenovasi masjid melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari dukungan semua pihak seperti perangkat dusun, tokoh masyarakat, serta anggota masyarakat dusun itu sendiri. Meskipun telah melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, namun pada kenyataannya masih adanya berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan

tersebut. Hambatan-hambatan itu antara lain:

Kurangnya Anggaran (Biaya) dalam Renovasi Masjid Al-Falah

Pendanaan berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Hasil pemanfaatan cagar budaya; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, menurut UU No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Oleh karena itu, Masjid Al-Falah Dusun Empelu juga termasuk cagar budaya yang ada di Kabupaten Bungo dalam hal bangunannya. Sebab berdasarkan sejarah masjid tersebut merupakan masjid yang tertua di Kabupaten Bungo.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan cagar budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Pendanaan pelestarian cagar budaya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Hal ini diakui oleh Datuk Rio Dusun Empelu bahwa : “Sampai saat ini, belum

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Ilyas Sebagai Ketua Panitia Renovasi Masjid Al-Falah Dusun Empelu, Tanggal 05 Mei 2016

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Defriwan Sebagai Sekretaris Panitia Renovasi Masjid Al-Falah Dusun Empelu, Tanggal 06 Mei 2016

ada bantuan dari instansi yang terkait dengan cagar budaya untuk renovasi Masjid Al-Falah Dusun Empelu. Yang kami tahu Kantor Departemen Agama (Kadepag) Kabupaten Bungo selaku departemen keagamaan belum juga merealisasikan dana tentang renovasi tersebut. Apalagi Masjid Al-Falah termasuk masjid tertua yang ada di Kabupaten Bungo dan telah dijadikan sebagai cagar budaya.”¹⁴

Semua fasilitas masjid yang sudah ada harus dikelola dengan baik dan tepat penggunaannya, karena hal itu merupakan bagian dari amanat umat. Di samping itu, semua fasilitas yang ada hendaknya dikembangkan sedemikian rupa. Artinya seluruh fasilitas yang ada tadi harus dirawat atau dipelihara dengan baik dan ditambah atau diperluas dan dilengkapi, sehingga fasilitas tersebut makin hari keberadaannya kian relatif lebih baik, lebih lengkap, lebih bermanfaat, lebih memadai serta lebih bisa memenuhi kebutuhan manajemen jama'ah dan kebutuhan umat Islam pada umumnya.

Memelihara bangunan fisik masjid mencakup berbagai sisi diantaranya :¹⁵

- a. Memelihara keindahan masjid, baik dari sisi artistik atau keindahan dan kenyamanan masjid bagi para jamaah. Juga dengan memperhatikan segala hal yang mengganggu keindahan masjid, baik interior maupun eksterior
- b. Memelihara lingkungan masjid, lingkungan masjid yang dimaksud adalah daerah yang masih dalam

wilayah masjid, seperti halaman depan dan belakang, taman-taman, serta jalan menuju masjid, juga perlu diperhatikan. Sebaiknya daerah di sekitar masjid dibersihkan atau dibebaskan dari keramaian yang mengganggu khusyuknya pelaksanaan ibadah

- c. Memelihara suasana masjid, menciptakan suasana tenang dengan meminimalisir segala gangguan. Juga, menciptakan suasana tertib bagi para jamaah yang hadir di dalam masjid, termasuk tertib shaf (barisan shalat) dan tertib dalam penempatan barang, juga mengatur tempat khusus untuk jamaah perempuan. Kemudian, menjaga keamanan setiap jamaah yang masuk ke dalam masjid
- d. Memelihara ketertiban masjid, dilakukan dengan menegakkan tata tertib yang berlaku di dalam masjid atau etika yang seharusnya diikuti oleh setiap jamaah seperti dilarang berbicara dan mengobrol tanpa memperhatikan batasan syar'i
- e. Memelihara masjid di waktu malam adalah bentuk penjagaan terhadap kehormatan dan seluruh harta kekayaan masjid dari tindak kriminal dan pelecehan. Sebab, dimungkinkan akan ada orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu mencemarkan masjid dengan tindakan yang tidak terpuji

Terselenggaranya kegiatan yang membuat masjid menjadi makmur amat memerlukan fasilitas fisik masjid yang memadai guna untuk kepentingan peribadatan secara khusus, dan ditambah lagi informasi dari tokoh agama yang juga kami wawancarai bahwa: “Kurangnya fasilitas-fasilitas masjid tersebut disebabkan kurangnya dana dalam melengkapinya, sehingga

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Datuk Rio (Marzuki) Dusun Empelu, Tanggal 03 Mei 2016

¹⁵ Eman Suherman, *Manajemen Masjid Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul*, Alfabeta, Bandung, 2012, Hal. 113-115

untuk renovasi Masjid Al-Falah pun pada saat ini terhambat dan mengakibatkan fasilitas masjid tidak memadai untuk di rasakan oleh masyarakat dusun seperti kamar mandi/wc dan tempat wudhu.”¹⁶

Daya dukung yang tidak bisa dipisahkan dari upaya memakmurkan masjid adalah dana yang cukup. Tapi yang terjadi sekarang, Masjid Al-Falah justru kekurangan dana. Jangankan untuk mengembangkan aktivitas, untuk menyelesaikan pembangunan dan melengkapi fasilitasnya saja kekurangan dana. Akibatnya, begitu banyak dana yang harus dicari agar pembangunan masjid tersebut berjalan dengan lancar.

Perbedaan Pendapat Antara Pemerintah Dusun Dengan Masyarakat Tentang Konsep Bangunan

Konsep bangunan adalah rancangan global sebelum didirikannya suatu bangunan. Hal ini sangat penting dibuat agar pembangunan yang direncanakan tidak melenceng dari perencanaan. Dalam membangun masjid harus berbeda dengan membangun sebuah rumah, karena masjid merupakan tempat ibadah, maka nuansa spiritual yang mewarnai bangunan masjid tersebut harus diperhatikan. Serta pelaksanaan ibadah dan aktivitas lain yang menjadi ciri khas dan karakter masjid pun juga harus diperhatikan.

Nasrun selaku masyarakat Dusun Empelu mengungkapkan bahwa, “Sangat disayangkan dengan adanya perubahan pada renovasi masjid yang bersejarah ini.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Rifa'i sebagai Tokoh Agama Dusun Empelu, Tanggal 04 Mei 2016

Bentuk masjid berbeda dari yang dulu seperti yang terlihat pada saat ini.”¹⁷

Ditambah lagi oleh Arifin Saleh, bahwa “Perubahan renovasi pada masjid sekarang terlihat pada bentuk bangunannya yang menghilangkan sebagian dari nilai sejarah yang ada. Padahal masjid tersebut merupakan masjid bersejarah yang ternama di Kabupaten Bungo yang dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat Dusun Empelu.”¹⁸

Dalam setiap pembangunan pasti ada hambatan-hambatannya seperti anggaran (biaya). Untuk pemerintah dusun dan panitia pembangunan, bentuk masjid kedepannya harus punya rancangan (konsep) pembangunan masjid dan pengerjaannya secara bertahap, agar masyarakat memahami arti pembangunan masjid yang jelas. Apalagi ini adalah pembangunan masjid yang akan menjadi kebanggaan bagi pemerintah dusun dan masyarakat Dusun Empelu.

Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah dusun dalam merenovasi Masjid Al-Falah Dusun Empelu, antara lain yaitu :

Menetapkan Iuran Bagi Masyarakat Dusun untuk Melanjutkan Pembangunan Renovasi Masjid

Dalam upaya menggerakkan program pembangunan, dana merupakan salah satu penggerak utama yang menentukan dalam penyelenggaraan

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Nasrun, Masyarakat Dusun Empelu, Tanggal 08 Mei 2016

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Arifin Saleh, Masyarakat Dusun Empelu, Tanggal 08 Mei 2016

pembangunan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan tanpa didorong oleh dana yang memadai prosesnya akan pincang dan hal ini merupakan fenomena umum yang dialami setiap daerah tak terkecuali Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal. Untuk mengantisipasi fenomena tersebut, berbagai upaya dilakukan termasuk di dalamnya kemampuan pemerintah dusun dalam menggerakkan partisipasi masyarakat menghimpun dana yang cukup untuk menyelenggarakan pembangunan secara berkelanjutan.

Setiap masjid hendaknya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM) agar semua rencana kerja dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Sumber-sumber dana masjid diantaranya :¹⁹

Zakat, infaq, dan sedekah masyarakat

Wakaf

Donatur

Marzuki selaku Rio Dusun Empelu mengatakan bahwa: “Salah satu upaya yang kami lakukan untuk melanjutkan pembangunan Masjid Al-Falah yaitu dengan iuran dari masyarakat. Namun, iuran tersebut dikurangi dari sebelumnya mengingat ekonomi masyarakat dusun yang menurun.”²⁰

Hal senada juga diungkapkan oleh Defriwan bahwa: “Mengingat sumber-sumber dana untuk pembangunan masjid yang masih kurang dari infaq, shadaqah, dan lain sebagainya, maka untuk penambahannya dilakukan iuran terhadap

masyarakat dusun, namun tidak memberatkan masyarakat.”²¹

Upaya untuk membangun dan memakmurkan masjid harus disertai dengan orang-orang yang memakmurkannya, berbagai macam usaha berikut ini bila benar-benar dilaksanakan, dapat diharapkan memakmurkan masjid secara material dan spiritual. Namun, semuanya itu tetap tergantung pada kesadaran dari pribadi masing-masing. Seperti dalam suatu organisasi pemerintahan, baik pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dan pemerintahan dusun, hendaklah masyarakat bekerja sama dalam suatu kegiatan seperti pada renovasi masjid yang merupakan tanggung jawab bersama.

Seperti yang dijelaskan oleh Arifin, bahwa : “Sebaiknya para pemerintah dusun lebih mengayomi masyarakat karena suara tertinggi itu ditangan masyarakat. Jadi, apapun yg dilakukan tentang perubahan dusun termasuk masjid, sebaiknya harus ada musyawarah dengan masyarakat, agar apa yang dilakukan nantinya berjalan sesuai dengan yang diharapkan bersama.”²²

Defriwan selaku Sekretaris Panitia Renovasi menambahkan bahwa “Yang kami inginkan adalah terwujudnya masjid yang lebih bagus bangunannya, namun semua itu tidak begitu didukung oleh sebagian masyarakat, sehingga pada saat dilakukan renovasi terjadilah perbedaan pendapat antara pemerintah dusun dengan

¹⁹ Zaini Dahlan, *Manajemen Masjid Dalam Pembangunan Masyarakat Optimalisasi Peran dan Fungsi Masjid*, Yogyakarta, UII Press, 2001, Hal. 52-59

²⁰ Hasil Wawancara dengan Datuk Rio (Marzuki) Dusun Empelu, Tanggal 03 Mei 2016

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Defriwan Sebagai Sekretaris Panitia Renovasi Masjid Al-Falah Dusun Empelu, Tanggal 06 Mei 2016

²² Hasil Wawancara dengan Bapak M.Sayuti sebagai Tokoh Agama Dusun Empelu, Tanggal 10 Mei 2016